

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDESA) DI DESA DABUK REJO  
KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OKI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SKRIPSI**



**IMAN NURHAKIM**

**NIM. 07011381621167**

**Konsentrasi Keuangan Negara**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(APBDesa) di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI  
Tahun Anggaran 2020"

Skripsi

Oleh :  
Iman Nurhakim  
07011381621167

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 14 Juli 2022

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001
2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

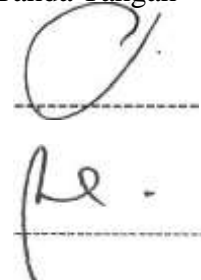
Tanda Tangan



Penguji:

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM  
NIP.195811191985031003
2. Junaidi, S.IP., M.Si  
NIP. 197603092008021009

Tanda Tangan



Mengetahui :


Dekan FISIP




Prof. Dr. Alfritri, M.Si  
NIP. 196601221990031004



Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 1969111001994011001



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iman Nurhakim  
NIM : 07011381621167  
Tempat dan Tanggal Lahir : Cahyamas, 28 Oktober 1996  
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 27 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Iman Nurhakim

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain”

(HR. Ahmad).

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Diri Sendiri
2. Kedua Orangtua, Bapak  
Muharuddin, SP dan Ibu  
Kasmiyati
3. Kedua Kakak dan Adik Saya
4. Teman dan Sahabat Saya
5. Rekan seperjuangan Borneo,  
Daffa, Jimy, Kemas dan Yoga
6. Almamater kebanggan saya

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hi Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan pencipta segala alam. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan juga hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan berserta sahabat-sahabatnya.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Pembimbing I yang selalu sabar dalam membimbing, memberikan solusi dan masukan, serta kritik dan saran yang sangat membangun.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Pembimbing II yang selalu sabar dalam membimbing, memberikan solusi dan masukan, serta kritik dan saran yang sangat membangun.
7. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Sutikno, S.Sos selaku Kepala Desa, Desa Dabuk Rejo yang telah membantu dan memberika informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Pegawai/Staff Kantor Desa yang berada di Desa Dabuk Rejo yang telah membantu dan memberika informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Orang Tua saya, Bapak Muharuddin, SP dan Ibu Kasmiyati yang selalu mendoakan, mendukung secara moril dan material selama proses perkuliahan penulis.
11. Kakak dan Adik saya yang telah memotivasi dan selalu memberikan semangat serta doa bagi saya.
12. Rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2016 Kampus Palembang.
13. Teman dan Sahabat saya yang selalu memotivasi dan senantiasa membantu saya dalam hal apapun.

Palembang, Agustus 2022

Iman Nurhakim

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) terkait kurangnya transparansi dalam setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes yang didukung seperti nota barang/jasa dan tidak adanya baliho. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dabuk rejo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Teori Stewardship yaitu Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dabuk rejo terlaksana dengan baik. Pada penelitian ini, penulis menyarankan untuk menambahkan beberapa transparansi kepada masyarakat agar lebih terbuka.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Anggaran, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Transparansi, Desa Dabuk Rejo.**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si**  
NIP.196311061990031001

**Pembimbing II**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP.198108272009121002

**Palembang, Agustus 2022**  
**Ketua Jurusan Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP.196911101994011001

## ABSTRACT

*This research is motivated by problems in the management of the village income and expenditure budget (APBDesa) related to the lack of transparency in each expenditure at the expense of the supported APBDes such as goods/service notes and the absence of billboards. This study aims to determine the management of the income and expenditure budget of Dabuk Rejo village. The research method used is a qualitative research method. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The theory used is the Stewardship Theory, namely the village government carries out its duties in making financial accountability in the form of presenting accountable and transparent financial statements in accordance with the characteristics of financial statements (relevant, reliable, understandable and comparable). The results showed that the management of the income and expenditure budget of the Dabuk Rejo village was carried out well. In this study, the authors suggest adding some transparency to the public to make it more open.*

**Key Words : Management, Budget, Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDesa), Transparency, Dabuk Rejo Village.**

**Advisor I**



**Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si**  
**NIP.196311061990031001**

**Advisor II**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP.198108272009121002**

**Palembang, August 2022**  
**Department Chief of The Public Administration**  
**Faculty of Social And Political Science**  
**Sriwijaya University**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP.196911101994011001**

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan Teori.....	7
1. Pengertian Desa .....	7
2. Konsep Administrasi Publik .....	10
3. Konsep Keuangan Negara.....	14
4. Konsep Analisis .....	19
5. Konsep Pengelolaan.....	20
6. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	21
7. Pengelolaan Keuangan Desa.....	27
B. Alasan Memilih Teori .....	34
C. Penelitian Terdahulu .....	35
D. Kerangka Pemikiran.....	35

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Definisi Konsep .....	38
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	39
E. Informan Penelitian.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40

## **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	42
1. Gambaran Umum Desa Dabuk Rejo.....	42
a. Gambaran Umum Desa Dabuk Rejo.....	42
b. Birokrasi Pemerintahan Desa Dabuk Rejo .....	44



c. Aspek Geografis.....	44
d. Keadaan Iklim Desa Dabuk Rejo.....	45
e. Jumlah Penduduk.....	46
f. Struktur Pemerintahan Desa .....	48
g. Struktur Pendapatan Transfer Desa .....	51
h. Visi dan Misi Desa Dabuk Rejo.....	52
B. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa .....	53
C. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.....	55
D. Pembahasan Pengelolaan APBDes.....	55
1. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	58
2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	61
3. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	62
4. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	64
5. Transparansi Pengelolaan APBDes .....	66
6. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes .....	67

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

## **Daftar Pustaka**

## **Lampiran**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian Terdahulu .....	36
2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pencapaian Pokok .....	46
3. Penganut Agama dan Kepercayaan .....	47
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Dabuk Rejo Tahun Anggaran 2020.....	57
5. Hasil Sarana dan Prasarana di Desa Dabuk Rejo yang dibangun sampai saat ini pada tahun 2020 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	35
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI.....	48
3. Struktur Pendapatan Transfer Desa .....	51
4. Kegiatan Musyawarah Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Surat Penunjukan Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
3. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
4. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi
6. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I
7. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan juga memiliki pemerintahan sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan.

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar setiap desa dapat mengelola potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat,

mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Selain Kepala Desa dan perangkat desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan pemerintahan dengan anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis.

Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tiap desa.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga ikut mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah. Sumber daya manusia yang dimaksud ialah aparatur desa yang akan menjalankan roda kegiatan di desa termasuk dalam pengelolaan keuangan. Jika desa memiliki aparat yang berkualitas dan memiliki keahlian akuntansi yang baik, akan lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakan asas akuntabilitas. Sebaliknya, jika aparat yang dimiliki desa tidak berkualitas maka akan sulit bagi desa untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Tahun 2019 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa.

Desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan Kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Maka dari itu kunci kesuksesan pemerintah desa dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat. Tanpa kerjasama yang baik, maka pembangunan desa akan sulit dicapai.

Hal yang juga sangat penting untuk dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlu dilakukan kegiatan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal. Pola swakelola, artinya mengupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tidak mengalir keluar desa.

Kemudian, menggunakan tenaga kerja setempat artinya dalam pelaksanaan kegiatan bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang bekerja. Sementara menggunakan bahan baku lokal diharapkan dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Pencapaian Dana Desa tentunya masih memerlukan penyempurnaan. Baik dalam hal perencanaan, pengelolaan dan mengawal Dana Desa agar tepat sasaran. Diperlukan regulasi yang disusun secara baik dan disiplin agar menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga pengalokasian Dana Desa dapat terwujud.

Dana Desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari APBDes. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Desa Dabuk Rejo yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI yang sebagian besar masyarakatnya mengandalkan usaha pertanian, buruh tani, dan PNS.



Penulis tertarik untuk meneliti di Desa Dabuk Rejo terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), karena dampak dari adanya APBDes ini mampu meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Ketertarikan ini dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Dabuk Rejo karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan APBDes di Desa Dabuk Rejo. Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya. Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dihasilkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2020 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik dan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Secara praktis:
  - a. Dapat memberikan masukan berupa solusi untuk mengetahui tentang Pengelolaan pelaporan dana desa.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pelaporan dana desa.
  - c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan mengenai pengelolaan pelaporan dana desa.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan kajian terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta untuk menambah referensi bagi penelitian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Soewarno. 2002. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.
- The, Liang, Gie. 2009. Administrasi Perkantoran Modern.
- Siagian. 2008. Filsafat Administrasi.
- Lionardo, Andries. 2011. Administrasi Pemerintah Daerah. Tunggal Mandiri, Malang
- Asmawati, et al. 2018. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 25.3. Hal. 2379-2401.
- Bastian. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Faradhiba, L., dan Diana, N. 2018. Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Jombang. E-JRA. Vol. 07 No. 07.
- Farida, et al. 2018. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Jurnal Akademi Akuntansi. Volume 1, No. 11, hal. 64-73.
- Fitri. 2015. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *e-jurnal karalogis*. Volume 3. Hal. 180-192.
- Iqsan. 2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Volume 4, Hal. 230-240.
- Kiki, S. 2015. "tata kelola keuangan desa". *Akuntansi dan bisnis*, Vol. 15, No. 1, hal. 33-37.

- Kurnia. 2015. *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: "Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tentang Desa"*, Jakarta, BPKP.
- Leonardo, et al. 2017. Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No. 2 Hal. 1474-1483.
- Mahsun, et al. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nafidah, et al. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.
- Orangbio, et al. 2017. Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pratiwi, U., Ulfah, P. 2018. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 6 (3). Hal 429-440.
- Ramli, M. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Volume 10(1). Page 19-30
- Sanusi, et al. 2014. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Volume 2 Nomor 3
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpade. Banda Aceh: Read*.
- Utomo, S. J. 2015. "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di

Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto”. *Media Trend*, Vol. 10, No. 1, hlm:19-31

Wiratna, V. S. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta. Penerbit: Pustaka Baru Press.

Yuliansyah., Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Bandar Lampung. Penerbit: Salemba Empat.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.